



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Membangkitkan Dinasti Politik Lokal: Dinamika Kemunculan Politik Kekerabatan di Kabupaten Pasangkayu

Framing Local Political Dynasties: Dynamics of the Emergence of Kinship Politics in Pasangkayu Regency

Rusmawaty Bte Rusdin^{1*}, Gustiana Kambo², Muhammad Saad³, Muhammad Nur Alamsyah⁴

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Indonesia

⁴Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, Indonesia

*Corresponding author E-mail: Rusmawatyrusdin19@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 07 Apr, 2025

Revised: 20 May, 2025

Accepted: 20 May, 2025

Kata Kunci:

Politik Kekerabatan, Legasi Politik, Kesempatan Politik

Keywords:

Kinship Politics, political legacy, political opportunity

DOI: [10.56338/jks.v8i5.7548](https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7548)

ABSTRAK

Salah satu sorotan penting adalah maraknya praktik politik kekerabatan yang muncul dalam setiap kontestasi Pilkada. Fenomena politik kekerabatan menjadi dinamika yang menonjol dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Tokoh sentral dari kemunculan praktik ini adalah Agus Ambo Djiwa, yang tidak hanya dikenal sebagai Bupati dua periode, tetapi juga sebagai pejuang pemekaran daerah. Mengacu pada teori Titin Purwaningsih (2015), berkembangnya politik kekerabatan di Pasangkayu dipengaruhi oleh empat indikator utama, yaitu akar politik kekerabatan, dukungan budaya, legasi politik, dan kesempatan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar politik kekerabatan di Pasangkayu berawal dari peran figur sentral dalam perjuangan pembentukan daerah otonom Mamuju Utara. Bentuk legasi politik tampak melalui proses sosialisasi politik, pewarisan jaringan kekuasaan, serta keterlibatan dalam organisasi. Selain itu, budaya patron-klien turut memperkuat struktur politik kekerabatan yang ada. Dari keempat aspek tersebut, kesempatan politik menjadi faktor paling dominan dalam mendorong berkembangnya fenomena politik kekerabatan di Pasangkayu.

ABSTRACT

One important highlight is the rampant practice of kinship politics that emerges in every Pilkada contest. The phenomenon of kinship politics has become a prominent dynamic in the context of local democracy in Indonesia, including in Pasangkayu Regency, West Sulawesi. The central figure in the emergence of this practice is Agus Ambo Djiwa, who is not only known as a two-term Regent, but also as a fighter for regional expansion. Referring to Titin Purwaningsih's theory (2015), the development of kinship politics in Pasangkayu is influenced by four main indicators, namely the roots of kinship politics, cultural support, political legacy, and political opportunities. This study uses a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through interviews, observations, and written documentation. The results of the study show that the roots of kinship politics in Pasangkayu began with the role of central figures in the struggle to form the autonomous region of North Mamuju. The form of political legacy is seen through the process of political socialization, inheritance of power networks, and involvement in organizations. In addition, the patron-client culture also strengthens the existing kinship political structure. Of the four aspects, political opportunities are the most important factor.

PENDAHULUAN

Kajian mengenai politik lokal terus menjadi perhatian berbagai kalangan, khususnya pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melahirkan beragam fenomena politik di tingkat lokal dan dipandang sebagai instrumen efektif untuk memperkuat pemerintahan (Sulistiyanto & Erb, 2009); (Hanif & Pratikno, 2012). Namun demikian, berbagai studi menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasinya (Choi, 2007), (Mboi, 2009), (Aspinall, & As'ad, 2016). Fenomena politik kekerabatan atau politik dinasti terus menjadi sorotan dalam kajian politik lokal, terutama setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) yang awalnya dipandang sebagai mekanisme demokrasi untuk memperkuat pemerintahan lokal (Sulistiyanto & Erb,

2009; Hanif & Pratikno, 2012), justru melahirkan dinamika baru yang mengindikasikan lemahnya proses demokratisasi di tingkat daerah (Choi, 2007; Mboi, 2009; Aspinall & As'ad, 2016). Salah satu dampak dari dinamika ini adalah menguatnya praktik politik kekerabatan, di mana kekuasaan politik diturunkan atau diwariskan dalam lingkup keluarga.

Secara konseptual, tidak terdapat definisi tunggal mengenai politik kekerabatan. Istilah ini sering digunakan secara bergantian dengan politik dinasti atau politik keluarga (Rusdin, 2021). Casey menyebut politik kekerabatan sebagai praktik politik yang melibatkan individu yang memiliki hubungan darah atau pernikahan, yang sering kali berlangsung lintas generasi (Casey, 2008). Hess mendefinisikan dinasti politik sebagai suatu keluarga di mana sedikitnya empat anggota yang memiliki nama keluarga yang sama pernah menduduki jabatan public (Hess, 1966). Sementara itu, Asako (2012) memaknai politik dinasti sebagai praktik di mana anggota keluarga menggantikan atau melanjutkan kekuasaan politik dari anggota keluarga lainnya yang pernah memegang jabatan (Asako, 2012).

Dal Bo et al. membedakan antara politik kekerabatan dan politik dinasti dari segi temporal dan kuantitatif (Dal Bo et al., 2009). Politik kekerabatan mengacu pada keberlangsungan kekuasaan dalam dua atau lebih generasi, sementara politik dinasti merujuk pada kekuasaan lintas empat generasi atau lebih dalam satu keluarga. Dalam praktiknya, fenomena ini sulit dipisahkan dari realitas kekuasaan elit, di mana keluarga-keluarga tertentu memiliki pengaruh besar dalam penentuan arah kebijakan dan penguasaan sumber daya politik.

Menurut Purwaningsih (2015), kekerabatan politik sebagai tren perekrutan politik di mana kerabat ditempatkan dalam peran kritis pemerintah tanpa memperhatikan bakat atau kepatuhan terhadap standar demokrasi. Bentuk perekrutan ini lebih didasarkan pada kekerabatan-melalui pernikahan dan juga darah-daripada dalam proses demokrasi meritokratis. Namun, jika proses pemilihannya demokratis dan berdasarkan mandat, tidak semua anggota keluarga yang menduduki jabatan publik dapat secara jelas diklasifikasikan sebagai bagian dari dinasti politik (Purwaningsih, 2015).

Fenomena politik kekerabatan menemukan rumah di lingkungan demokrasi elektoral yang rendah dan pragmatisme politik yang kuat. Regenerasi partai yang lemah, pengeluaran politik yang tinggi, dan pengaruh besar elit lokal-pengusaha, birokrat, dan tokoh publik lainnya-membuka ruang bagi praktik pewarisan kekuasaan. Jauh di peta kekuasaan lokal, pemain elit seperti militer, polisi, pengusaha, pemuka agama, bahkan mafia dan aktivis sudah penting sebelum gejala dinasti politik berkembang (Bathoro, 2011).

Salah satu ciri menguatnya politik kekeluargaan dalam rangka pilkada adalah keikutsertaan istri, anak, atau kerabat dekat petahana dalam pencalonan pemimpin daerah (Djati, 2013). Dukungan partai politik besar terhadap pemimpin keluarga saat ini-meski bukan kader partai - juga mendukung perilaku tersebut (Purwaningsih, 2013). Sebaliknya, dominasi elit dalam pemilihan kepala daerah merongrong semangat desentralisasi dan demokrasi elektoral yang justru berupaya meningkatkan keterlibatan politik masyarakat (Hadiz, 2007), (Choi, 2019).

Praktik politik kekerabatan juga tidak lepas dari relasi patrimonial dan klientelisme yang kerap terjadi di tingkat lokal. Hal ini diperparah dengan semakin terbukanya struktur pemerintahan pasca desentralisasi yang memungkinkan elite lokal yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik untuk masuk dan menguasai kontestasi pemilu daerah. Akibatnya, desentralisasi yang semula diharapkan mendorong kemandirian daerah justru menciptakan "raja-raja kecil" di daerah yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kroni mereka (Effendi, 2018), (Wance, 2018).

Provinsi seperti Banten dan Sulawesi menjadi contoh menonjol dalam praktik politik kekerabatan (Purwaningsih, 2013). Dalam konteks tersebut, dinamika politik kekerabatan tidak hanya dipengaruhi oleh figur tertentu, tetapi juga oleh lemahnya institusi partai dalam menjalankan fungsi kaderisasi, tingginya nilai transaksional dalam politik lokal, serta keberlanjutan praktik oligarki yang tetap eksis meski Orde Baru telah tumbang.

Dengan kata lain, meskipun reformasi telah mengubah lanskap politik nasional secara mendasar, fenomena politik kekeluargaan terus berkembang pesat di masa otonomi daerah. Skenario ini

menunjukkan bahwa demokrasi prosedural belum sepenuhnya mampu menangkal dominasi otoritas berbasis keluarga. Politik kekerabatan oleh karena itu harus dilihat sebagai hasil interaksi antara sejarah otoritas lokal, kekurangan institusi politik, dan struktur sosial yang masih tertanam kuat dalam hubungan patron-klien.

Salah satunya di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, fenomena politik kekeluargaan berkembang menjadi sorotan dalam dinamika demokrasi lokal di Indonesia. Agus Ambo Djiwa, yang bukan hanya Bupati dua periode tetapi juga pendukung pembangunan daerah, sangat penting dalam evolusi teknik ini. Fungsi historisnya sebagai pendorong perluasan wilayah memberi orang-orang posisi strategis dalam pikiran mereka, yang kemudian mereka gunakan sebagai pijakan pertama untuk membangun pengaruh politik yang lebih umum. Validitas historis yang diperoleh dari posisi tersebut berubah menjadi modal politik yang kuat yang membantu menciptakan struktur kekuasaan berbasis keluarga. Fenomena ini dengan demikian mengungkapkan bahwa politik kekeluargaan di Pasangkayu adalah ciptaan yang disengaja didukung oleh otoritas simbolik dan kontrol atas infrastruktur lokal, bukan pembangunan alam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan secara langsung dan mendalam interaksi antara peneliti dengan objek penelitian. Menurut Moleong, metodologi penelitian kualitatif memberikan penyajian yang lugas dan responsif dalam menangkap realitas sosial yang kompleks serta pola nilai-nilai yang berkembang di masyarakat (Moleong, 2017). Kesederhanaan metode ini memungkinkan peneliti untuk lebih adaptif dalam memahami berbagai dinamika yang terjadi di lapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber tidak tertulis melalui wawancara mendalam dengan informan serta observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis. Sedangkan data sekunder merupakan data tertulis yang diperoleh dari dokumen seperti surat, arsip, gambar, leaflet, panduan, dan bahan tertulis lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Pengolahan data dilakukan secara sistematis mengikuti tiga tahap utama menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yaitu: (1) kondensasi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data agar lebih fokus dan relevan; (2) penyajian data, berupa pengorganisasian informasi dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik; dan (3) penarikan serta verifikasi kesimpulan, yakni tahap akhir untuk menguji keabsahan temuan dan menyusun interpretasi yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas kemunculan politik kekerabatan Agus Ambo Djiwa di Pasangkayu, dengan menggunakan kerangka teori yang dikemukakan oleh Titin Purwaningsih. Teori Titin Purwaningsih memetakan politik kekerabatan ke dalam beberapa dimensi utama, yaitu akar politik kekerabatan, legasi politik, dukungan budaya, dan kesempatan politik. Keempat dimensi ini menjadi alat analisis penting untuk memahami bagaimana figur seperti Agus Ambo Djiwa bisa muncul dan membangun posisi politik yang kuat di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Pasangkayu.

Akar Politik Kekerabatan

Politik kekerabatan, sebagai fenomena sosio-politik, melampaui sekadar hubungan darah dan persaudaraan. Ia telah menjelma menjadi sebuah strategi konsolidasi dan reproduksi kekuasaan yang mengakar kuat dalam struktur sosial dan pemerintahan (Choi, 2019). Fenomena ini bukanlah hal baru dalam sejarah kekuasaan; ia telah menjadi bagian integral dalam dinamika kekuasaan sejak masa lalu, baik dalam reorganisasi kekuasaan kaum bangsawan maupun pembentukan kekuatan birokrasi dan militer pada era Orde Baru. Studi yang dilakukan oleh Titin Purwaningsih di Sulawesi Selatan

mengungkapkan bahwa banyak keluarga politik di wilayah tersebut berakar pada struktur bangsawan (Muur & Bedner, 2016). Warisan kekuasaan dan pengaruh sosial ini secara turun-temurun menciptakan dinasti politik yang kokoh dan sulit ditembus oleh kekuatan alternatif (Siregar et al., 2021). Dalam konteks politik Indonesia, pola politik kekerabatan ini merupakan salah satu pola dominan dalam pembentukan kekuasaan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Biasanya, jaringan kekuasaan ini berasal dari kalangan bangsawan, birokrat, penguasa, maupun tokoh agama yang memiliki pengaruh luas di masyarakat. Kekuasaan sering diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan, aliansi perkawinan, atau jejaring sosial yang mengelilingi elite lama. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan cenderung terjadi dalam lingkaran terbatas, sehingga kehadiran aktor baru dari luar kelompok elit menjadi langka dan menarik untuk ditelaah.

Di tengah pola tersebut, muncul sosok Agus Ambo Djiwa di panggung politik Pasangkayu, Sulawesi Barat, yang menghadirkan fenomena unik. Berbeda dengan elite politik lokal kebanyakan yang berasal dari keluarga bangsawan, birokrat, pengusaha, atau tokoh agama, Agus muncul dari medan perjuangan rakyat, khususnya dalam gerakan pemekaran daerah. Agus dikenal luas sebagai Ketua Komite Aksi Perjuangan Pemekaran Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu). Perjuangan yang dipimpinnya bukan sekadar langkah administratif atau politik, tetapi lahir dari aspirasi masyarakat untuk mendapatkan perbaikan layanan publik, percepatan pembangunan, dan otonomi yang lebih berpihak pada rakyat. Reputasi Agus sebagai tokoh pejuang pemekaran menjadi sumber utama legitimasi politiknya, bukan karena garis keturunan, jabatan birokratis, ataupun kekuasaan ekonomi maupun keagamaan.

Politik kekerabatan memang sudah lama menjadi pilar penting dalam peta kekuasaan lokal di Indonesia. Penelitian Titin Purwaningsih di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga politik di sana berasal dari kalangan bangsawan, yang status kebangsawanannya bukan sekadar simbol prestise sosial, melainkan modal penting untuk mengakses dan mempertahankan kekuasaan. Dalam banyak kasus, posisi politik diwariskan turun-temurun, membentuk dinasti kuat melalui jaringan perkawinan, hubungan darah, dan aliansi strategis antar keluarga elite. Pola ini menciptakan akumulasi kekuasaan yang terbatas pada lingkaran sempit dan meminimalkan ruang bagi aktor dari kalangan biasa. Namun, jika kita menengok Sulawesi Barat, khususnya Pasangkayu, ditemukan dinamika berbeda. Di sini, aktor politik berpengaruh tidak semata berasal dari kalangan bangsawan atau warisan elite lama, melainkan dari tokoh pergerakan dan pejuang daerah, terutama dalam perjuangan pemekaran wilayah. Agus Ambo Djiwa merupakan contoh nyata. Lahir sebagai putra Ambo Djiwa, mantan kepala Desa Sarudu, Agus tumbuh di lingkungan yang dekat dengan masyarakat dan membangun identitas politik melalui pengabdian sosial serta advokasi pembangunan daerah. Perannya sebagai Ketua Komite Aksi Perjuangan Pemekaran Mamuju Utara bukan sekadar agenda politik formal, melainkan komitmen aspirasi masyarakat akan otonomi, pemerataan pembangunan, dan perbaikan pelayanan publik.

Berbeda dengan banyak daerah di Indonesia, di mana tokoh pejuang pemekaran sering terlupakan setelah tujuan tercapai, situasi di Pasangkayu berbeda. Agus Ambo Djiwa tidak hanya dikenang, bahkan dikultuskan sebagai pahlawan daerah yang membawa perubahan signifikan. Perannya sebagai Ketua Komite Aksi Perjuangan Pemekaran Mamuju Utara sangat melekat dalam ingatan kolektif masyarakat, yang menilai keberhasilan pemekaran tidak terlepas dari kepemimpinan, keberanian, dan ketekunannya. Kultus terhadap tokoh pemekaran ini bertransformasi menjadi fondasi politik kekerabatan pasca pemekaran. Agus tidak berhenti sebagai tokoh perjuangan, tetapi berlanjut ke lingkaran kekuasaan formal, memperkuat pengaruh politiknya di tingkat lokal. Dalam konteks ini, politik kekerabatan di Pasangkayu diterima secara sosial sebagai kelanjutan alami dari sejarah panjang dan perjuangan nyata. Masyarakat memandang keberlanjutan peran Agus dan keluarganya bukan sebagai pelanggaran kekuasaan semata, melainkan sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang telah diberikan di masa lalu.

Legasi Politik

Dalam konteks politik Indonesia, legasi politik sering kali berkaitan erat dengan pembentukan dinasti politik, terutama ketika kekuasaan keluarga tokoh politik dipertahankan melalui pencalonan istri, anak, menantu, atau saudara kandung dalam jabatan politik yang sama atau serupa. Legasi politik sendiri merujuk pada warisan atau peninggalan politik yang ditinggalkan oleh seorang pemimpin, baik berupa kebijakan, gaya kepemimpinan, maupun dominasi keluarga dalam institusi politik. Legasi ini dapat memiliki makna positif, seperti keberlanjutan pembangunan dan stabilitas politik, namun juga berpotensi menjadi alat pelanggaran kekuasaan apabila diwariskan secara eksklusif kepada kerabat tanpa mempertimbangkan kompetensi.

Fenomena politik kekerabatan yang kuat dalam keluarga Agus Ambo Djiwa tidak hanya didasarkan pada pewarisan elit struktural maupun fungsional, tetapi juga dipengaruhi oleh proses sosialisasi politik yang berlangsung dalam keluarga. Di lingkungan keluarga Agus Ambo Djiwa, diskusi dan pembicaraan mengenai politik dilakukan secara kontinu, menumbuhkan minat dan kesadaran politik sejak dini di antara anggota keluarganya.

Jejak politik keluarga Agus Ambo Djiwa dapat ditelusuri sejak masa Orde Baru, ketika Ambo Djiwa dan Yaumil Ambo Djiwa menjabat sebagai kepala Desa Sarudu, yang saat itu masih merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan sebelum pemekaran Sulawesi Barat. Kiprah politik keluarga ini tidak lepas dari pengaruh kuat Partai Golkar, yang menjadi kendaraan utama dalam membangun jejaring kekuasaan di tingkat lokal.

Sebagai kepala desa, Ambo Djiwa dan Yaumil tidak hanya memimpin secara administratif, tetapi juga memainkan peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan pusat kekuasaan. Mereka memanfaatkan posisi tersebut untuk memperluas pengaruh politik dan membangun basis sosial yang kuat di tengah masyarakat. Partai Golkar menjadi wadah politik yang memperkuat eksistensi keluarga ini, dengan loyalitas yang terus dirawat dan diperluas hingga ke generasi berikutnya.

Pasca reformasi, ketika banyak elit politik lokal kehilangan pijakan akibat berubahnya sistem politik nasional, keluarga Agus Ambo Djiwa justru mampu beradaptasi. Agus, sebagai generasi penerus, tampil di panggung politik formal dan meniti karier sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu, lalu Wakil Bupati Mamuju Utara, dan akhirnya menjabat sebagai Bupati selama dua periode. Kepemimpinannya dikenal membawa perubahan signifikan, terutama dalam bidang infrastruktur dan pelayanan publik.

Meskipun Agus kemudian menjadi kader PDI Perjuangan, kekuatan politik Golkar tetap terasa dalam lingkaran keluarganya, terutama melalui adiknya, Yaumil Ambo Djiwa, yang melanjutkan estafet kepemimpinan sebagai Bupati Pasangkayu dari Partai Golkar. Pola ini menunjukkan bahwa identifikasi partai dalam keluarga bersifat diwariskan namun juga adaptif terhadap konteks politik yang berkembang.

Tesis klasik *The American Voter* (Campbell et al., 1960) menjelaskan bahwa identifikasi partai adalah bentuk pewarisan politik yang kuat dalam keluarga, terbentuk sejak dini melalui sosialisasi politik dan cenderung stabil sepanjang hayat. Fenomena ini terlihat jelas dalam keluarga Agus Ambo Djiwa, di mana afiliasi politik telah mengakar dan tidak mudah berubah meskipun terdapat perbedaan pilihan partai antara anggota keluarga.

Menariknya, pewarisan nilai dan identitas politik dalam keluarga ini tidak hanya tampak dalam preferensi partai, tetapi juga dalam keterlibatan generasi muda keluarga di bidang organisasi. Anak-anak Agus dan Yaumil mengikuti jejak orang tua mereka dengan aktif terlibat dalam organisasi-organisasi yang sama atau sejenis. Mereka tidak hanya didorong untuk mendukung secara pasif, melainkan turut serta secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, organisasi pemuda, dan bahkan dalam kepemimpinan partai.

Misalnya, beberapa anak mereka tercatat aktif dalam organisasi kepemudaan yang memiliki keterkaitan dengan partai atau lembaga politik lokal, serta terlibat dalam kegiatan sosial

kemasyarakatan yang memperkuat eksistensi politik keluarga. Aktivitas ini mencerminkan bagaimana pewarisan politik tidak hanya bersifat simbolik atau struktural, tetapi juga menyentuh aspek fungsional dan praktis dari keterlibatan dalam ruang publik.

Dengan demikian, politik kekerabatan dalam keluarga Agus Ambo Djiwa tidak hanya dipertahankan melalui jabatan politik formal, tetapi juga melalui pewarisan nilai, identitas, dan aktivitas organisasi di kalangan generasi muda. Ini memperkuat konsistensi dan kesinambungan dinasti politik mereka, sekaligus menunjukkan bagaimana sosialisasi politik dalam keluarga memainkan peran penting dalam membentuk komitmen politik yang berkesinambungan dan terstruktur.

Dukungan Budaya

Dalam banyak kasus, keberhasilan seseorang dalam meraih posisi politik di tingkat lokal sangat bergantung pada kemampuan mengakses dan memanfaatkan jaringan kekerabatan yang telah tertanam kuat dalam struktur sosial masyarakat. Budaya kekerabatan di berbagai daerah di Indonesia sering kali menjadi faktor penentu dalam memenangkan dukungan publik. Relasi kekeluargaan, ikatan darah, serta hubungan emosional dengan tokoh adat dan agama memiliki pengaruh besar dalam proses mobilisasi suara. Politik kekerabatan tidak sekadar mencerminkan hubungan personal, melainkan menjelma sebagai instrumen kolektif dalam menentukan pilihan politik. Masyarakat cenderung memberikan dukungan kepada calon yang memiliki keterkaitan kekerabatan, atau setidaknya koneksi yang kuat dengan tokoh yang dihormati dalam komunitas mereka.

Kabupaten Mamuju Utara, yang kini dikenal sebagai Kabupaten Pasangkayu, memiliki akar sejarah yang panjang, salah satunya sebagai bagian dari Afdeling Mandar pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Afdeling Mandar merupakan salah satu satuan administratif di bawah Keresidenan Celebes en Onderhoorigheden (Sulawesi dan Daerah Taklukannya), yang mencakup wilayah barat Pulau Sulawesi. Dalam struktur ini, wilayah Mamuju Utara termasuk dalam salah satu onderafdeling yang secara geografis berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan wilayah-wilayah pesisir Sulawesi Barat saat ini.

Keberadaan wilayah ini dalam struktur Afdeling Mandar membawa pengaruh besar dalam perkembangan sosial, budaya, dan politik masyarakat setempat. Secara kultural, wilayah ini mendapat pengaruh dari budaya Mandar, meskipun masyarakatnya sangat plural secara etnografis terdiri dari suku Mandar, Bugis, Kaili, serta kelompok pendatang seperti Jawa, NTT, NTB, Sunda, dan Bali. Pluralitas ini mulai terbentuk sejak masa kolonial melalui kebijakan migrasi ekonomi dan transmigrasi spontan, serta aktivitas perdagangan antardaerah.

Secara administratif, pengaruh kolonial terlihat dalam bentuk tata kelola pemerintahan, sistem pajak, hingga model pemanfaatan lahan. Salah satu warisan penting adalah pembentukan perkebunan kelapa dan kakao, yang menjadi fondasi ekonomi masyarakat Pasangkayu hingga kini. Jalur transportasi antara Mamuju, Mamuju Utara, dan wilayah-wilayah sekitarnya juga berkembang sebagai bagian dari upaya kolonial mendukung mobilitas komoditas ekspor.

Pasca-kemerdekaan, struktur administratif kolonial seperti Afdeling Mandar dihapuskan, dan wilayah-wilayah bekasnya diintegrasikan dalam Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Selatan. Baru pada tahun 2003, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003, Mamuju Utara dimekarkan menjadi kabupaten tersendiri. Pemekaran ini merupakan bagian dari semangat desentralisasi era reformasi, di mana masyarakat daerah pinggiran menuntut kontrol lebih besar atas pembangunan mereka sendiri.

Warisan Afdeling Mandar tetap hidup dalam memori kolektif masyarakat Pasangkayu, tidak hanya sebagai sejarah administratif, tetapi juga sebagai kerangka identitas sosial-budaya. Warisan ini turut mempengaruhi konfigurasi kekuatan politik lokal, termasuk melalui jaringan kekerabatan dan ikatan etnis yang berperan besar dalam proses elektoral. Identitas Mandar dan pluralitas etnis menjadi variabel penting yang membentuk preferensi politik dan distribusi kekuasaan.

Dalam konteks ini, keberhasilan Agus Ambo Djiwa menapaki karier politik hingga dua periode sebagai Bupati Pasangkayu tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya lokal yang kental dengan nilai-

nilai kekerabatan. Ia lahir dari keluarga yang memiliki posisi sosial terhormat di masyarakat. Sebagai putra dari Ambo Djiwa, seorang kepala desa yang disegani, nama "Ambo Djiwa" telah menjadi simbol legitimasi sosial yang kuat di kalangan masyarakat Pasangkayu. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai genealogis dan kultural, nama keluarga memiliki daya pengaruh yang signifikan dalam membangun kepercayaan politik.

Dalam lanskap politik lokal Indonesia, budaya patron-klien merupakan salah satu pola dominan yang memperkuat relasi antara elite dan masyarakat akar rumput. Pola ini ditopang oleh relasi personal, loyalitas timbal balik, serta pertukaran sumber daya antara patron (tokoh berpengaruh) dan klien (pendukung atau masyarakat biasa). Dalam konteks Kabupaten Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa menampilkan pola patron-klien yang kuat sebagai salah satu fondasi utama kekuasaannya.

Sebagai figur sentral dalam perjuangan pemekaran Kabupaten Mamuju Utara (kini Pasangkayu), Agus Ambo Djiwa berhasil membangun basis dukungan yang luas melalui relasi kultural dan emosional dengan masyarakat. Ia tidak hanya hadir sebagai pemimpin formal, tetapi juga sebagai figur patron yang dianggap mampu memenuhi aspirasi kolektif masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya, pelayanan publik, lapangan pekerjaan, dan pembangunan infrastruktur.

Budaya lokal yang menjunjung tinggi nilai solidaritas, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap pemimpin memberi ruang bagi munculnya relasi patron-klien yang stabil. Dalam masyarakat Pasangkayu yang plural secara etnis namun tetap mengedepankan relasi personal, figur seperti Agus memainkan peran penting sebagai penghubung antara negara dan warga. Posisi ini memungkinkan ia menjanjikan perlindungan, bantuan sosial, serta pengaruh terhadap penempatan birokrasi dan alokasi proyek—yang kemudian ditukar dengan loyalitas politik dan dukungan elektoral dari klien-kliennya.

Relasi patron-klien yang dibangun Agus juga ditopang oleh budaya politik lokal yang paternalistik, di mana pemimpin dihormati bukan hanya karena jabatannya, tetapi karena perannya dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Keberhasilan Agus membangun jaringan loyalitas ini diperkuat oleh kemampuan mengakomodasi kelompok-kelompok strategis—baik tokoh agama, tokoh adat, kepala desa, hingga pemuda—ke dalam lingkaran kekuasaannya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan Agus Ambo Djiwa tidak bisa dilepaskan dari kemampuan mengelola relasi budaya dan kekuasaan secara bersamaan. Ia mampu memadukan peran sebagai pemimpin administratif sekaligus sebagai patron tradisional yang memberikan proteksi, akses, dan status sosial bagi klien-klien politiknya. Kultur timbal balik (reciprocity) dalam relasi ini menjadikan politik sebagai arena pertukaran bukan hanya gagasan, tetapi juga sumber daya yang bersifat konkret dan simbolik.

Dukungan budaya terhadap Agus juga muncul dari pengakuan masyarakat terhadap status sosial keluarganya. Sebagai putra dari Ambo Djiwa, seorang kepala desa yang dihormati, Agus membawa beban simbolik dan moral sebagai penerus nilai-nilai kepemimpinan yang telah tertanam di tengah masyarakat. Nama keluarga menjadi modal simbolik yang memperkuat posisi Agus sebagai patron, sekaligus memperluas jangkauan klien-klien baru dari berbagai latar belakang etnis dan sosial.

Dalam praktiknya, relasi patron-klien di bawah kepemimpinan Agus Ambo Djiwa tidak hanya bersifat vertikal, tetapi juga melembaga secara horizontal melalui jaringan keluarga besar, struktur birokrasi lokal, dan organisasi sosial. Relasi ini kemudian berkembang menjadi politik kekerabatan, di mana loyalitas tidak hanya diberikan kepada Agus sebagai individu, tetapi juga kepada keluarga besarnya sebagai entitas politik yang kolektif.

Dengan demikian, dukungan budaya terhadap Agus Ambo Djiwa bersifat ganda: pertama, sebagai hasil dari konstruksi patron-klien yang memberikan jaminan material dan simbolik; dan kedua, sebagai bagian dari penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai kepemimpinan lokal berbasis kekerabatan, solidaritas etnis, dan penghormatan tradisional terhadap tokoh yang dianggap berjasa. Kombinasi ini menjadikan posisi politik Agus tidak hanya sah secara elektoral, tetapi juga kuat secara kultural.

Kesempatan Politik

Desentralisasi dan pilkada (pemilihan kepala daerah) adalah dua tonggak penting dalam sistem demokrasi Indonesia pascareformasi 1998. Desentralisasi memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya, sementara pilkada memberi hak kepada rakyat untuk memilih langsung pemimpin daerah mereka. Harapan dari dua mekanisme ini adalah terwujudnya pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun dalam praktiknya, desentralisasi dan pilkada juga membuka ruang bagi tumbuhnya elit-elit lokal baru dan menguatnya politik kekerabatan atau yang sering disebut sebagai dinasti politik.

Pada dasarnya, desentralisasi membuka peluang besar bagi daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Namun, pelimpahan kewenangan ini juga menciptakan ruang kekuasaan baru di tingkat lokal. Kepala daerah memiliki otoritas yang luas dalam pengelolaan anggaran, perizinan, pengangkatan pejabat, hingga pembuatan kebijakan daerah. Dalam konteks ini, posisi kepala daerah menjadi sangat strategis, bukan hanya dalam pelayanan publik, tetapi juga sebagai sumber kekuasaan politik dan ekonomi. Tidak mengherankan jika jabatan kepala daerah menjadi sangat diperebutkan oleh para elit lokal.

Seiring dengan berjalannya pilkada langsung, muncul fenomena di mana elit-elit politik daerah mampu memanfaatkan jaringan, sumber daya, dan kekuasaan untuk mempertahankan dominasinya. Mereka bukan hanya berhasil merebut kekuasaan sekali, tetapi juga membangun basis kekuatan jangka panjang melalui pengaruh keluarga, kerabat, atau kroni. Fenomena ini yang kemudian dikenal sebagai politik kekerabatan atau dinasti politik.

Politik kekerabatan terjadi ketika kepala daerah yang sedang menjabat atau pernah menjabat menggunakan pengaruhnya untuk mendorong anggota keluarga atau kerabat dekat mencalonkan diri dalam pemilihan berikutnya. Terkadang istri, anak, adik, dan menantu kepala daerah ikut pilkada baik untuk menggantikan jabatan kepala daerah yang sudah kadaluarsa atau untuk maju di jenjang jabatan lain seperti DPRD atau jabatan eksekutif di berbagai tingkatan. Hal ini terjadi karena para elit politik ini memiliki keunggulan dibandingkan kandidat lain yang tidak dimiliki kandidat lain: akses ke sumber daya keuangan, jaringan birokrasi, pengaruh media, dukungan publik, dll.

Fenomena ini tentunya memiliki pengaruh yang beragam. Di satu sisi, kelangsungan kepemimpinan elit lokal dan politik kekeluargaan membantu membangun stabilitas politik daerah. Di sisi lain, pengaruh negatifnya jauh lebih menakutkan. Politik kekerabatan dapat menutup jalan bagi persaingan politik yang konstruktif, menghentikan peremajaan kepemimpinan, dan meningkatkan praktik nepotisme, korupsi, dan kerja sama. Memang, bukan hal yang aneh bagi kepala daerah dari dinasti politik untuk mengutamakan kebutuhan keluarga atau organisasi mereka di atas kebutuhan masyarakat.

Penelitian dan berbagai laporan media menunjukkan bahwa politik kekerabatan bukan hanya terjadi di satu-dua daerah, tetapi sudah menyebar di banyak provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Kecenderungan ini diperkuat oleh lemahnya regulasi yang membatasi dinasti politik, serta rendahnya literasi politik masyarakat yang masih cenderung memilih berdasarkan kedekatan emosional atau popularitas, bukan pada rekam jejak atau kapabilitas calon.

Lebih jauh lagi, tumbuhnya elit-elit lokal dan politik kekerabatan juga mencerminkan kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi. Banyak partai politik lebih memilih mengusung calon dari keluarga atau kerabat kepala daerah karena dianggap lebih mudah memenangkan pemilihan, ketimbang mempersiapkan kader-kader potensial yang lahir dari proses meritokrasi. Dengan demikian, pilkada seringkali berubah menjadi ajang mempertahankan kekuasaan kelompok tertentu, bukan lagi arena kompetisi gagasan untuk kepentingan publik.

Salah satu dinamika penting dalam politik lokal di Indonesia adalah munculnya para pejuang pemekaran daerah yang berhasil mendapatkan posisi strategis di lembaga legislatif, khususnya DPRD. Fenomena ini tidak terlepas dari desain sistem pemilu yang digunakan di Indonesia, yaitu sistem pemilu

proporsional terbuka. Sistem pemilu proporsional terbuka, yang diterapkan sejak Pemilu 2009, memungkinkan pemilih untuk tidak hanya memilih partai politik, tetapi juga langsung memilih calon legislatif (caleg) yang mereka inginkan dari daftar caleg yang diajukan partai. Dengan sistem ini, caleg yang memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihan akan mendapatkan kursi, terlepas dari nomor urutnya dalam daftar partai. Artinya, popularitas personal seorang calon menjadi sangat penting, bahkan seringkali lebih menentukan dibanding kekuatan partainya sendiri.

Agus Ambo Djiwa dikenal sebagai tokoh sentral dalam perjuangan pemekaran Kabupaten Mamuju Utara, meski sejatinya banyak tokoh lain yang juga berperan penting. Popularitas Agus sebagai simbol perubahan, ditambah kesempatan politik melalui sistem pemilu proporsional terbuka, menjadi faktor utama yang mengantarnya terpilih sebagai anggota DPRD pada 2004. Dalam pemilu legislatif, khususnya di tingkat DPRD kabupaten/kota atau provinsi, para pejuang pemekaran ini memanfaatkan popularitas mereka untuk maju sebagai calon legislatif. Dengan sistem proporsional terbuka, mereka memiliki peluang besar untuk mendapatkan kursi karena dukungan langsung dari masyarakat. Masyarakat yang merasa berutang budi atau berterima kasih atas perjuangan pemekaran sering kali secara sukarela memberikan dukungan suara. Hal ini terjadi bahkan ketika mereka maju dari partai yang tidak begitu populer di tingkat nasional, karena basis suara yang kuat berada di tingkat lokal.

Fenomena ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, masuknya pejuang pemekaran ke DPRD dapat membawa keuntungan bagi daerah. Mereka dianggap memahami kebutuhan dan aspirasi daerah, memiliki jaringan politik yang luas, serta punya legitimasi di mata masyarakat. Dengan posisi mereka di DPRD, mereka dapat mendorong alokasi anggaran yang lebih baik, memperjuangkan pembangunan infrastruktur, hingga mendorong kebijakan afirmatif bagi daerah pemekaran yang masih berjuang mengejar ketertinggalan. Namun, di sisi lain, ada tantangan yang perlu dicermati. Tidak semua pejuang pemekaran memiliki kapasitas sebagai legislator yang baik. Sebagian dari mereka hanya bermodal popularitas tanpa memiliki kemampuan legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang memadai. Selain itu, dalam beberapa kasus, perjuangan pemekaran bukan hanya soal kesejahteraan rakyat, tetapi juga dipengaruhi oleh ambisi kekuasaan dan pembagian sumber daya ekonomi-politik. Akibatnya, ketika duduk di DPRD, tidak jarang mereka terjebak dalam pragmatisme politik, lebih sibuk mengamankan kepentingan pribadi dan kelompok daripada memperjuangkan kepentingan rakyat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka memang membuka ruang demokrasi yang lebih besar, memungkinkan tokoh-tokoh lokal yang populer untuk maju dan menang, termasuk para pejuang pemekaran. Namun, sistem ini juga membawa tantangan baru, yakni soal kualitas para wakil rakyat yang terpilih. Oleh karena itu, pendidikan politik masyarakat, peningkatan kualitas kaderisasi partai, serta penguatan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif menjadi sangat penting agar keberadaan pejuang pemekaran di parlemen lokal benar-benar membawa manfaat bagi pembangunan daerah.

Pada akhirnya, masuknya pejuang pemekaran ke DPRD melalui pemilu proporsional terbuka adalah cermin dari dinamika politik lokal Indonesia yang terus berkembang. Ini menunjukkan bahwa suara rakyat memiliki kekuatan untuk mengangkat tokoh-tokoh yang dianggap berjasa, sekaligus menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak berhenti pada bilik suara, tetapi harus berlanjut dalam proses pengawasan dan akuntabilitas wakil rakyat yang telah dipilih.

Agus Ambo Djiwa saat itu muncul sebagai figur sentral, dipercaya memimpin gerakan rakyat dengan menjabat sebagai Ketua Komite Pejuang Pemekaran. Sebagai ketua, Agus tidak hanya memainkan peran formal, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan elite politik pusat, berjuang melobi pemerintah pusat, DPR RI, serta berbagai pihak yang terkait agar Sulawesi Barat dapat menjadi provinsi sendiri, lepas dari Sulawesi Selatan.

Perannya sebagai ketua komite bukan hanya memberinya reputasi sebagai tokoh perlawanan politik yang memperjuangkan nasib rakyat, tetapi juga memberikan modal sosial dan politik yang sangat besar. Nama Agus semakin dikenal luas, baik di kalangan masyarakat bawah, tokoh adat, tokoh

agama, hingga kalangan birokrasi. Keberhasilannya dalam memimpin perjuangan pemekaran menjadi semacam “sertifikat legitimasi politik” yang sangat berharga.

Momentum besar kemudian datang pada Pemilu 2004, yang untuk pertama kalinya menggunakan sistem proporsional terbuka. Sistem ini memungkinkan rakyat tidak hanya memilih partai, tetapi juga langsung menentukan siapa calon legislatif (caleg) yang mereka pilih. Ini adalah perubahan besar dari sistem sebelumnya yang berbasis proporsional tertutup, di mana partai punya peran lebih dominan dalam menentukan siapa yang duduk di parlemen. Bagi Agus Ambo Djiwa, perubahan sistem ini menjadi peluang emas untuk masuk ke panggung politik formal.

KESIMPULAN

Fenomena politik kekerabatan dalam Pilkada Kabupaten Pasangkayu menunjukkan bahwa dinamika politik lokal tidak dapat dilepaskan dari peran kuat jaringan keluarga. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kekerabatan tidak hanya menjadi faktor pendukung, tetapi telah bertransformasi menjadi modal utama dalam kontestasi politik. Hal ini ditunjukkan melalui dominasi keluarga Agus Ambo Djiwa yang berhasil mengonsolidasikan kekuasaan baik di ranah eksekutif maupun legislatif secara berkelanjutan.

Pertama, akar politik kekerabatan di Pasangkayu bertumpu pada posisi strategis tokoh sentral yang terlibat sejak masa perjuangan pemekaran daerah. Agus Ambo Djiwa, sebagai tokoh pemekaran, memperoleh legitimasi moral dan historis dari masyarakat, yang kemudian digunakan untuk membangun basis kekuasaan yang kuat dan berkelanjutan.

Kedua, legasi politik menjadi penting dalam mewariskan pengaruh politik kepada anggota keluarga lainnya. Kesuksesan Agus Ambo Djiwa sebagai bupati dua periode menjadi titik tolak terbentuknya dinasti politik, yang kemudian diteruskan oleh anggota keluarganya seperti Yaumil Ambo Djiwa (Kakak), Hj. Erni (istri), Rian (Anak) dan Irfandi (ponakan). Fenomena ini memperlihatkan adanya pewarisan kekuasaan yang sistematis dan terstruktur.

Ketiga, dukungan budaya dan nilai lokal seperti budaya patron-klien, penghormatan terhadap tokoh lokal, serta simbolisme “putra daerah” turut menguatkan posisi politik keluarga tersebut. Masyarakat Pasangkayu yang masih menjunjung tinggi nilai solidaritas suku, etnis, dan kekeluargaan memandang bahwa memilih keluarga pejuang pemekaran adalah bentuk penghargaan dan loyalitas kolektif.

Keempat, kesempatan politik yang tercipta melalui kelemahan sistem partai politik dan birokrasi yang mudah dikendalikan, dimanfaatkan secara efektif oleh keluarga Agus Ambo Djiwa. Rekrutmen politik dilakukan dengan mengandalkan kedekatan emosional dan jaringan kekuasaan. Struktur partai di tingkat lokal pun cenderung pragmatis dan terbuka terhadap kandidat yang memiliki kekuatan modal sosial dan finansial, sehingga memperkuat cengkeraman kekuasaan keluarga.

Akhirnya, fenomena ini memperlihatkan bahwa politik kekerabatan bukanlah sebatas praktik nepotisme, melainkan bagian dari strategi kekuasaan yang dibalut dengan narasi historis, kultural, dan simbolik. Dinamika ini menandai bagaimana politik lokal di Pasangkayu berkembang dalam corak yang khas berorientasi pada ikatan personal, kultural, dan keluarga yang mengaburkan batas antara kepentingan publik dan privat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asako, Yasushi. et.al. (2012). *Dynastic Politicians: Theory and Evidence from Japan*, Waseda University Organization for Japan-US Studies. Working Paper No. 201201. <https://ssrn.com/abstract=2118350> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2118350>
- Aspinall, E., & As'ad, M. U. (2016). ‘Understanding family politics: Successes and failures of political dynasties in regional Indonesia’, *South East Asia Research*.
- Bathoro, A. (2011). Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal FISIP Umrah*, 2(2), 115–125.

- Casey, K. L. (2008). *Political Families in American Electoral Politics*. University of Missouri.
- Choi, N. (2007). Local elections and democracy in Indonesia: The Riau Archipelago Local Elections and Democracy in Indonesia: The Riau Archipelago. 37–41. <https://doi.org/10.1080/00472330701408650>.
- Choi, N. (2019). Elections , Parties And Elites In Indonesia “ S Local Politics,. 15(3), 325–354.
- Dal Bo, E., Pedro Dal Bo, & Jason Snyder. (2009). “Political Dynasties.” *National Bureau of Economic Research* (Vol. 76). *The Review of Economic Studies*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-937X.2008.00519.x>
- Djati, W. R. (2013). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, 18(2), 203–231.
- Effendi, W. R. (2018). Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten,. 2(2), 98–113.
- Hadiz, V. R. (2007). *Localising Power in Post Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective* (Vol. 14). Stanford University Press.
- Hanif, H., & Pratikno. (2012). Local Politics in Indonesia, 1999-2010: A Literature Review. *PCD Journal*, 4(1), 181–209.
- Hess, S. (1966). *America’s Political Dynasties*. Routledge.
- Mboi, A. B. (2009). *Pilkada Langsung: The First Step on the Long Road to a Dualistic Provincial and District Government’*, in Erb, M. and Sulistiyanto, P. (eds) *Deepening Democracy in Indonesia?* Singapore: ISEAS, 38–49.
- Moleong, L. J. (2017). *Gama Media*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Purwaningsih. (2015). Politik Keekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik*, 1(1).
- Purwaningsih, T. (2013). *Politik Keekerabatan dalam Politik Lokal di Sulawesi Selatan Pada Era Reformasi (Studi Tentang Rekrutmen Politik pada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan Tahun 2009. Disertasi FISIP-Universitas Indonesia*.
- Rusdin, R. (2021). POLITIK KEKERABATAN AGUS AMBO DJIWA PADA PEMILUKADA KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2020. *Journal Publicuho*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.17710>
- Sulistiyanto, P., & Erb, M. (2009). *Indonesia and The Quest for “Democracy”*, in Erb, M. and Sulistiyanto, P. (eds) *Deepening Democracy in Indonesia?* Singapore: ISEAS, 1–37.
- Wance, M. (2018). *Modalitas Dinasti Ahmad Hidayat Mus Pada Pemilihan*.